

## ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KETERSEDIAAN INFORMASI KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Oleh

Florensia Helma Firmanti

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

E-mail: [fitifirmanti3@gmail.com](mailto:fitifirmanti3@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 15-12-2025

Revised: 22-12-2025

Accepted: 18-01-2026

### Keywords:

Human Development Index, Transparency, Availability of Financial Information, Local Government

**Abstract:** This study aims to analyze the influence of the Human Development Index (HDI) on the availability of transparent regional financial information. The availability of publicly accessible financial information is a key indicator of transparency and accountability in local government. HDI, which reflects the levels of education, health, and living standards of a population, is suspected to be closely related to public demands for open access to government information. This research employs a quantitative approach using simple linear regression analysis. The data used are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the official website of the local government of Kupang City over a certain period. The results of the study indicate that HDI has a positive and significant effect on the availability of regional financial information. In other words, the higher the HDI of a region, the more likely it is that financial information will be made publicly available. These findings highlight the importance of human development in encouraging transparent governance practices. It is hoped that this study can serve as a reference for local governments in improving the quality of public information services through strengthening education, healthcare, and social welfare.

---

## PENDAHULUAN

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan- pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan

indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM menjadi salah satu tolok ukur penting bagi pemerintah dalam menilai keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi capaian pembangunan manusia di berbagai daerah di Indonesia. Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki karakteristik pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang unik. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Kupang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta penyajian laporan keuangan. Transparansi keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Ketersediaan informasi keuangan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan sumber daya publik, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang berdampak pada IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetisi politik, IPM, dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan pemerintah daerah (Munzir et al., 2022). Konteks pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Di era reformasi, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami berbagai perubahan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi keuangan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah antara lain sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem akuntansi keuangan daerah kompetisi politik dan IPM juga ditemukan berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

IPM di Kota Kupang menunjukkan tren perkembangan tertentu yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk transparansi keuangan daerah. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM penting untuk memahami bagaimana peningkatan IPM dapat dicapai. BPKAD Kota Kupang memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah melalui publikasi laporan keuangan dan keterbukaan informasi anggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan oleh BPKAD dapat berdampak pada kualitas pembangunan manusia di Kota Kupang.

Ketersediaan informasi keuangan daerah yang transparan dan mudah diakses juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan adanya transparansi informasi keuangan daerah kota kupang sehingga badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Kupang lebih mudah dalam memberikan informasi keuangan daerah. transparansi informasi keuangan sangat penting karena bisa dengan mudah dalam memberikan informasi tanpa adanya kecurigaan dalam informasi keuangan.

Masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan publik dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah. informasi keuangan daerah yang transparan memudahkan masyarakat dalam membaca dan mempelajari bagaimana pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah khususnya badan pengelola keuangan dan aset daerah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi Keuangan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penyajian dari materi yang didapat sebagai hasil penelitian dengan memberikan gambaran uraian atau data apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Barella et al, 2022).

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 1 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda**

| Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |         |
|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|---------|
| B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF     |
| 147.112                     | 167.137    |                           | .880  | .408 |                         |         |
| -2.316                      | 3.104      | -.771                     | -.746 | .480 | .008                    | 128.631 |
| 1.246                       | .741       | 1.736                     | 1.681 | .137 | .008                    | 128.631 |

a. Dependen Variable: Y

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2025

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (X2) berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah (Y). Regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial.

$$Y=147,112-2,316 X1 +1,246 X2$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Konstanta

Konstanta menunjukkan nilai transparansi informasi keuangan daerah saat semua variabel independen (IPM dan ketersediaan informasi) bernilai nol. Dalam konteks

nyata, IPM dan ketersediaan informasi tidak mungkin nol, sehingga nilai ini tidak diartikan secara literal. Namun secara fungsional, konstanta diperlukan untuk membentuk model persamaan regresi. Kesimpulannya konstanta berfungsi sebagai titik awal model regresi. Nilainya menunjukkan estimasi transparansi saat IPM dan ketersediaan informasi dianggap tidak berpengaruh (nol).

## 2. Koefisien X1

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,316, yang berarti secara matematis, setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin akan menyebabkan penurunan nilai transparansi informasi keuangan daerah sebesar 2,316 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,480 ( $> 0,05$ ) menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Artinya, secara empiris, IPM tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah dalam model ini. Kesimpulannya Secara parsial, variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Meskipun arah hubungannya negatif, hal ini belum cukup kuat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan.

## 3. Koefisien X2

Koefisien regresi untuk variabel ketersediaan informasi keuangan sebesar 1,246 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada ketersediaan informasi keuangan akan meningkatkan transparansi sebesar 1,246 poin, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,137 ( $> 0,05$ ) menandakan bahwa pengaruh ini juga tidak signifikan secara statistik. Walaupun hubungan positif ini sesuai dengan teori (semakin banyak informasi, semakin transparan), secara statistik belum kuat untuk menyatakan ada pengaruh nyata. Kesimpulannya variabel ketersediaan informasi keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Meskipun menunjukkan hubungan positif, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan menggunakan tiga uji yaitu uji Kalmogrof - Smirnov dengan melihat nilai probabilitas, uji histogram dengan melihat bentuk grafiknya, dan uji p-plot dengan melihat apakah sebaran data mengikuti pola garis. Berikut hasil estimasi uji normalitas menggunakan software SPSS:

**Tabel 1 Hasil Estimasi Kalmogrof – Smirnov**

|                         | Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup> |    |       | Shapiro-Wilk |    |      |
|-------------------------|---------------------------------|----|-------|--------------|----|------|
|                         | Statistic                       | Df | Sig.  | Statistic    | Df | Sig. |
| Unstandardized Residual | .167                            | 10 | .200* | .924         | 10 | .393 |

\*. This is a lower bound of the true significance.

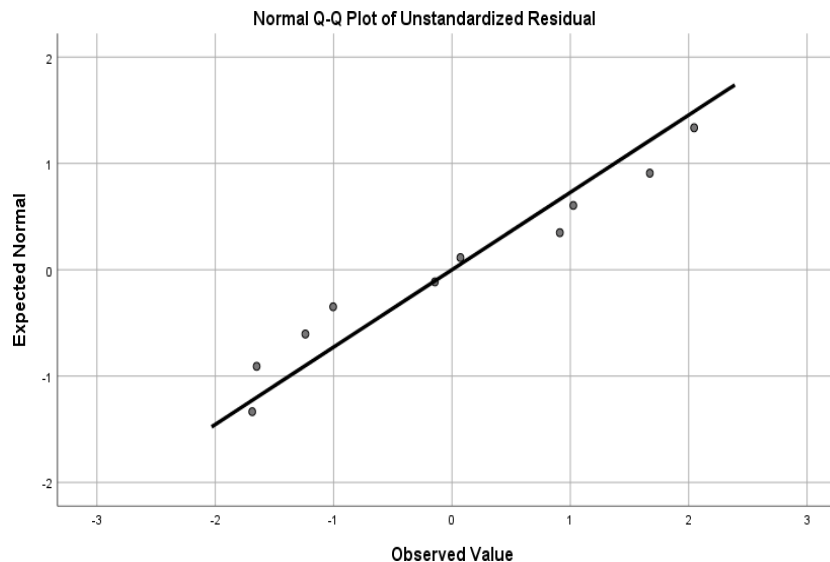
a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Olahan SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig (2tailed)* sebesar 200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji *Kalmogrof – Smirnov* diatas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal

selanjutnya, gambar P- plot dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Kurva P-Plot**



*Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2025*

Gambar P- plot dapat dilihat sebagai berikut: Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa titik- titik menyebar mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas dalam model regresi. Dalam mengambil kesimpulan kita akan melihat nilai *tolerance* dan VIF menggunakan program SPSS. Berikut hasil estimasi uji multikolinearitas menggunakan *software* SPSS:

**Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients Beta | T     | Sig. | Collinearity Statistics |         |
|--------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|-------------------------|---------|
|              | B                           | Std. Error |                                |       |      | Tolerance               | VIF     |
| 1 (Constant) | 147.112                     | 167.137    |                                | .880  | .408 |                         |         |
| IPM          | -2.316                      | 3.104      | -.771                          | -.746 | .480 | .088                    | 128.631 |
| KIKD         | 1.246                       | .741       | 1.736                          | 1.681 | .137 | .088                    | 128.631 |

a. Dependent Variable: Y

*Sumber: Olahan SPSS, 2025*

Nilai Tolerance untuk X1 dan X2 sama-sama lebih besar dari 0.10, yaitu sebesar 088. Nilai VIF untuk X1 dan X2 adalah 088, jauh di bawah batas 10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu observasi dengan observasi

yang lain. Tahap uji yang dilakukan yaitu uji Glejser dengan cara meregresikan variabel terikat terhadap nilai absolute residual atau ABS\_RES. Berikut hasil estimasi uji heteroskedastisitas menggunakan software SPSS:

**Tabel 3**  
**Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant) | 2.163                       | .717       |                           | 3.019  | .004 |
| X1         | -.010                       | .058       | -.026                     | -.168  | .867 |
| X2         | .019                        | .057       | .052                      | .337   | .737 |
| X3         | -.060                       | .048       | -.176                     | -1.234 | .221 |

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Olahan SPSS, 2025

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi linier. Tahap yang dilakukan yaitu uji Durbin Watson dengan melihat rasio jumlah kuadrat perbedaan dalam residual yang berturut-turut terhadap jumlah residu kuadrat. Berikut hasil estimasi uji autokorelasi menggunakan software SPSS:

**Tabel 4 Hasil Estimasi Uji Autokorelasi**

| Model | R    | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .971 | .942     | .925              | 1.55851                    | 2.437         |

a. Predictors: (Constant), KIKD, IPM

b. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: Olahan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (KIKD) terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,347. Nilai ini berada dalam rentang 1,5 hingga 2,5, yang menunjukkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi, baik positif maupun negatif. Artinya, residual (galat) dalam model bersifat acak, tidak memiliki pola atau hubungan tertentu dari satu waktu ke waktu lainnya. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,347 menunjukkan bahwa model regresi layak dan memenuhi asumsi klasik, khususnya pada aspek independensi residual.

#### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian ini menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan) berdasarkan hasil analisis regresi linear

berganda. Kriteria pengujian ditentukan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05.

#### 1. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana pada penelitian ini, variabel terikat adalah Transparansi informasi keuangan daerah kota Kupang (Y), Sedangkan variabel bebasnya terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (X1) Ketersediaan informasi Keuangan Daerah (X2) Untuk pengambilan keputusan dari uji t, maka perlu diperhatikan hasil output pada tabel coefficient menggunakan SPSS. Dimana hasil estimasi uji t adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 5 Hasil Estimasi Uji Parsial (t)**

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       | t     | Sig. |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |       |      |
| 1     | (Constant)                  | 147.112    | 167.137                   |       | .880  | .408 |
|       | IPM                         | -2.316     | 3.104                     | -.771 | -.746 | .480 |
|       | KIKD                        | 1.246      | .741                      | 1.736 | 1.681 | .137 |

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: Olahan SPSS, 2025

- a.  $H_0$  = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.  
 $H_1$  = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.  
 $H_2$  = Ketersediaan Informasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.
- b. Nilai alfa ( $\alpha$ ) adalah tingkat signifikansi yang digunakan sebagai batas toleransi terhadap kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik, yaitu kemungkinan menolak  $H_0$  padahal  $H_0$  benar.  $\alpha = 0,05$  atau 5% keputusan menolak  $H_0$  dianggap signifikan apabila nilai signifikansi (p-value) < 0,05.

#### c. t hitung dan t tabel

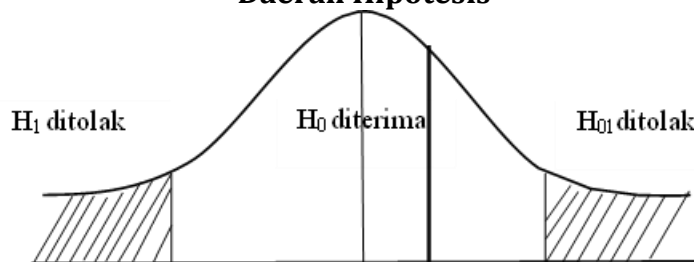
Hasil analisis menunjukkan bahwa:

nilai t hitung X1 terhadap Y = -0,746 dengan nilai signifikansi sebesar 0,480. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,480 > 0,05$ ) dan nilai  $|t \text{ hitung}| = 0,746 < t \text{ tabel} = 2,365$   $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya, secara parsial Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah di Kota Kupang.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung = 1,681 dengan nilai signifikansi sebesar 0,137. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,137 > 0,05$ ) dan t hitung = 1,681 < t tabel = 2,365, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian, secara parsial Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.

#### d. Gambar Daerah Hipotesis

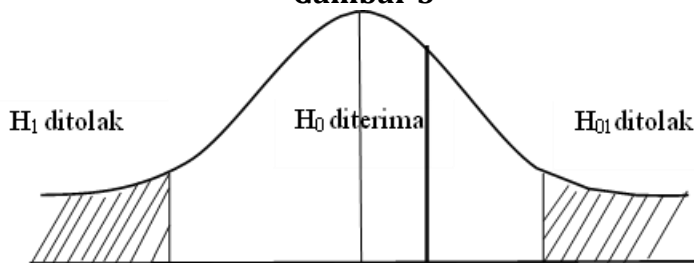
#### Gambar 2

**Daerah Hipotesis**

-2,365 -0,746 2,365

**e. Kesimpulan**

Uji T parsial variabel X1 mewakili indeks pembangunan manusia Pengambilan keputusan yang pertama dapat dilihat Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.). Pada tabel diatas, diketahui nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,480 dan jika dibandingkan dengan probabilitas 0,05 berarti nilai  $0,480 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat indeks pembangunan manusia (X1) terhadap Transparansi informasi keuangan daerah (Y).

**f. Gambar Daerah Hipotesis****Gambar 3**

0,137 1,681 0,137

**g. Kesimpulan**

Uji T parsial variabel X2 mewakili Ketersediaan informasi keuangan Daerah Pengambilan keputusan yang pertama dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi (Sig.). Pada tabel diatas, diketahui nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,137 dan jika dibandingkan dengan probabilitas 0,05 berarti nilai  $0,137 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh Ketersediaan informasi keuangan daerah (X2) terhadap Transparansi Informasi Keuangan (Y).

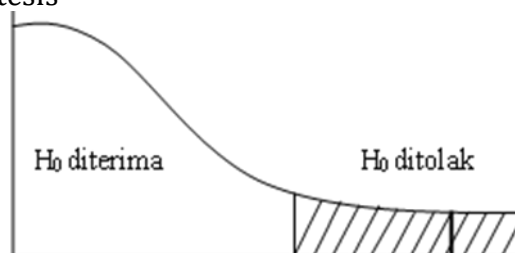
**1. Uji F**

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel Y. Di mana pada penelitian ini variabel terikatnya yaitu penyaluran kredit kreasi dengan variabel bebas yang terdiri dari IPM (X1), Ketersediaan Informasi Keuangan (X2) dan Transparansi informasi keuangan (Y). Untuk pengambilan keputusan dari uji F, maka perlu diperhatikan hasil output pada tabel ANOVA menggunakan SPSS.

**Tabel 6 Hasil Estimasi Uji F**

| Model        | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 275.942        | 2  | 137.971     | 56.803 | .000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 17.003         | 7  | 2.429       |        |                   |
| Total        | 292.945        | 9  |             |        |                   |

- a. Dependent Variable: Transparansi  
b. Predictors: (Constant), KIKD, IPM  
*Sumber: Olahan SPSS, 2025*
- H<sub>0</sub> = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.
  - H<sub>1</sub> = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (KIKD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.
  - Nilai alfa ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau 5% sebagai tingkat signifikansi dalam uji F. Nilai alfa ini menunjukkan batas probabilitas maksimum untuk menerima adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan, khususnya kesalahan tipe I, yaitu menolak hipotesis nol (H<sub>0</sub>).
- a. F hitung F tabel
- F tabel adalah nilai pembandingan (nilai kritis) yang diperoleh dari distribusi F pada taraf signifikansi tertentu (biasanya  $\alpha = 0,05$ ) df<sub>1</sub> (derajat bebas pembilang) = jumlah variabel independen (k) df<sub>2</sub> (derajat bebas penyebut) = n - k - 1 n = jumlah sampel (data tahun) = 10 k = jumlah variabel independen = 2  
 $df_1=2, df_2=10-2-1=7$   
F tabel = 2:7 pada  $\alpha = 0,05 = 4,46$
  - F hitung berdasarkan hasil regresi F hitung adalah sebesar 56,803. Karena F hitung = 56,803 > F tabel = 4,74  $\Rightarrow$  H<sub>0</sub> ditolak  
Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 56,803 dengan nilai F tabel sebesar 4,74 pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan derajat bebas (df<sub>1</sub> = 2 dan df<sub>2</sub> = 7). Karena F hitung > F tabel (56,800 > 4,46), maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, yang berarti bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (KIKD) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.
- a. Gambar Daerah Hipotesis



4,74 56,803

- a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan melalui uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 56,803 sedangkan nilai F tabel sebesar 4,74 pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$

dengan derajat bebas ( $df_1 = 2$ ;  $df_2 = 7$ ). Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel ( $56,800 > 4,74$ ), maka keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Artinya, variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (X2) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel informasi Keuangan Daerah yang transparan (X2) di Kota Kupang pada periode 2014–2023.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi (R square atau R kuadrat) atau disimbolkan dengan  $R^2$  berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Apabila nilai adjusted R square semakin besar atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) dalam menjelaskan variabel terikat (Y) adalah semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai adjusted R square semakin kecil atau mendekati nol, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) dalam menjelaskan variabel terikat (Y) adalah semakin lemah. Selanjutnya untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan IPM (X1), dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (X2) secara simultan terhadap Keuangan daerah yang transparan (Y) dapat dilihat pada tabel model summary menggunakan SPSS. Dimana hasil estimasi  $R^2$  adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 7 Hasil Uji Estimasi Determinasi ( $R^2$ )**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .169 <sup>a</sup> | .028     | -.014             | 1.12164                    |

**a. Predictors: (Constant), KIKD, IPM**

**Sumber: Olahan SPSS, 2025**

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar .028 Nilai ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yang tertera juga pada tabel diatas, yaitu  $.169 \times .169 = 0,28$ . Koefisien determinasi yang bernilai sebesar 0,28 mengandung arti bahwa IPM (X1), Dan Ketersediaan informasi keuangan Daerah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Transparansi informasi keuangan Daerah (Y). Nilai adjusted R square sebesar -.014 menunjukkan bahwa kemampuan variabel IPM (X1), ketersediaan informasi keuangan daerah (X2) dalam menerangkan variabel transparansi informasi keuangan daerah (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota kupang adalah nilainya sangat kecil.

### Pembahasan

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dimana data yang dihasilkan akan berbentuk angka. Dari data sekunder yang di dapat dari laporan tahunan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan bantuan program aplikasi komputer *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Pada penelitian ini digunakan metode studi kasus untuk menganalisis pengaruh IPM, Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah yang mana kedua variabel ini merupakan variabel bebas, terhadap Transparansi Informasi Keuangan yang merupakan variabel terikat. Setelah serangkaian analisis data dilakukan, maka pembahasan tentang hubungan antara variabelnya menjadi sebagai berikut:

**Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Transparansi Informasi Keuangan**

## Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan melalui analisis regresi linear berganda, diperoleh bahwa nilai koefisien IPM diperoleh dengan nilai signifikansi (Sig.). Karena nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha$  maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik, pengaruh IPM terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawan et al. (2019) yang meneliti *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Transparansi Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah di Indonesia*. Dalam penelitian tersebut, IPM ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan dan transparansi *Internet Financial Reporting* (IFR).

Kurniawan et al. (2019) menjelaskan bahwa meskipun IPM mencerminkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, variabel tersebut belum mampu mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengungkapkan informasi keuangan secara transparan melalui media internet. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem informasi keuangan yang mudah diakses, memperbaiki kualitas konten yang disampaikan kepada publik, serta meningkatkan literasi masyarakat dalam memahami anggaran dan pelaporan keuangan. Upaya-upaya ini dapat membuat hubungan antara IPM dan transparansi menjadi lebih nyata dan signifikan di masa depan.

## Pengaruh Ketersediaan Informasi Keuangan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan menggunakan SPSS, diperoleh nilai koefisien untuk variabel Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah (KIKD) dengan nilai signifikansi (Sig.) Nilai signifikansi ini lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha$  sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa: Variabel Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah. Namun demikian, arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa secara teori dan praktis, peningkatan ketersediaan informasi keuangan cenderung meningkatkan transparansi keuangan, meskipun dalam penelitian ini pengaruhnya belum terbukti secara signifikan.

Hasil ini masih mendukung teori *Good Governance*, yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan syarat utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Ketersediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh publik, seperti dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, dan laporan keuangan tahunan, semestinya menjadi sarana utama dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan temuan Lestari & Pratolo (2020) yang menyatakan bahwa ketersediaan informasi keuangan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat transparansi, karena penyediaan informasi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan upaya peningkatan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat.

## Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil uji F dalam analisis regresi linear berganda, diperoleh bahwa model regresi yang dibentuk adalah valid, ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel (X1) dan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Transparansi Informasi Keuangan Daerah. Dengan kata lain,

meskipun secara parsial masing-masing variabel tidak signifikan, secara bersama-sama kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada tingkat transparansi keuangan daerah. Temuan ini memperkuat anggapan bahwa upaya menciptakan transparansi keuangan daerah tidak cukup hanya dengan satu pendekatan, melainkan memerlukan kombinasi dari faktor sosial (X1) dan kelembagaan (X2). Daerah dengan tingkat IPM yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih terdidik, sehat, dan memiliki daya beli yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih peduli, kritis, dan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah, termasuk dalam aspek keuangan.

Sementara itu, ketersediaan informasi keuangan merupakan komponen penting dalam membuka ruang partisipasi publik. Ketika informasi keuangan daerah tersedia dalam bentuk dokumen yang lengkap, terstruktur, serta mudah diakses seperti laporan realisasi anggaran, APBD, dan audit dari BPK — maka masyarakat memiliki bekal untuk memahami bagaimana anggaran dikelola, apakah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Keterkaitan antara kedua variabel ini menciptakan efek yang saling memperkuat. Indeks Pembangunan manusia yang tinggi tanpa dukungan informasi yang terbuka tidak akan optimal dalam membangun transparansi, dan sebaliknya, ketersediaan informasi keuangan tanpa masyarakat yang sadar informasi juga tidak akan efektif. Oleh karena itu, kombinasi keduanya merupakan faktor krusial dalam menciptakan lingkungan tata kelola yang transparan dan akuntabel. ketersediaan informasi keuangan merupakan komponen penting dalam membuka ruang partisipasi publik. Ketika informasi keuangan daerah tersedia dalam bentuk dokumen yang lengkap, terstruktur, serta mudah diakses — seperti laporan realisasi anggaran, APBD, dan audit dari BPK maka masyarakat memiliki bekal untuk memahami bagaimana anggaran dikelola, apakah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Keterkaitan antara kedua variabel ini menciptakan efek yang saling memperkuat.

Penelitian ini sejalan dengan studi terdahulu oleh Wulandari (2019) yang menemukan bahwa ketersediaan informasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Wulandari menjelaskan bahwa semakin lengkap dan mudah diakses informasi tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat transparansi yang dapat dicapai oleh suatu pemerintah daerah. Ini berarti bahwa informasi tidak hanya harus tersedia, tetapi juga mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat sebagai alat kontrol pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi menciptakan sistem pemerintahan yang dapat diawasi oleh publik dan memberikan ruang bagi partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Seperti yang ditegaskan oleh UNDP (1997), OECD (2002), dan Mardiasmo (2021), keterbukaan informasi keuangan sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.

## KESIMPULAN

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Transparansi ketersediaan informasi keuangan daerah secara parsial berdasarkan hasil uji t diperoleh bahwa secara statistik indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang seharusnya mendukung transparansi, namun dalam

penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia belum cukup kuat untuk secara langsung memengaruhi transparansi.

2. Pengaruh ketersediaan informasi keuangan daerah terhadap transparansi secara parsial hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi ketersediaan informasi keuangan daerah tidak terdapat pengaruh signifikan antara ketersediaan informasi keuangan daerah dan transparansi informasi keuangan daerah. Walaupun secara teoritis ketersediaan informasi mendukung transparansi, namun dalam realitasnya masih terdapat kendala dalam penyajian, aksesibilitas, atau pemanfaatan informasi tersebut oleh masyarakat.
3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Hasil uji F menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah. Nilai F hitung menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan valid dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel. Artinya, Indeks Pembangunan Manusia dan Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah saling melengkapi dalam menjelaskan variasi pada tingkat transparansi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ady, S. U., Farida, I., Winedar, M., Mulyaningtyas, A., Susena, D. O. S., & Pratama, A. H. (2022). The Role Of Investors'behavior And Psychological Unbiasedness On The Digitization Of The Capital Market In Indonesia: Mediating Role Of Technology Advancement. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 14(2), 350-368.
- [2] Anggraini, F. R. R. (2006). Pengungkapan informasi sosial dan faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (Studiempiris pada perusahaan- perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi*, 9(23-26).
- [3] Araujo, J. F. F. de, & Tejedo-Romero, F. (2016). Women's political representation and transparency in local governance. *Local Government Studies*, 42(6), 885-906
- [4] Badewin, E. R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831-842.
- [5] Bappenas (2020). Laporan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2020.
- [6] Barella, Y., Fergina, A., Mustami, M. K., Rahman, U., Alajaili, H. M. (2022). Quantitative Methods in Scientific Research. *Journal of Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*.
- [7] Diani, R. P. (2016). Analisa Determinan Pelaporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia.
- [8] Gurendrawati, E., Ulupui, I. G. K. A., Hera Khairunnisa, S. E., Ak, M., Zairin, G. M., & SE, M. A. (2024). Akuntansi sektor publik. Bumi Aksara.
- [9] Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- [10] Hanifah, F. F. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia.

- 
- [11] Inri Jesika Bawowo, dkk (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan. Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi. Sulawesi Utara  
[12] Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- [13] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- [14] Jessica, N., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela: (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14-27. Keteraksasan Informasi Keuangan Daerah
- [15] Kurniawan, C. H., Atma, Novi, L., & Scorpiani, K. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksasan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. 31(2), 184–206.
- [16] Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. 24, 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- [17] Lestari, D., & Pratolo, S. (2020). Pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 120–134.
- [18] Lestari, Novia Indah, Mery Ramadani, and Sutikno Sutikno. "Peran E-Lifestyle, Budaya Digital, Dan E-Payment Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Y Dalam Bertransaksi di E-Commerce." *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* 7.2 (2022): 173-186. Management. Paris: OECD Publishing.
- [19] Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
- [20] Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif Tentang Pengelolaan Anggaran Di Sulawesi Tenggara. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 225-235.
- [21] Medina, F. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.
- [22] Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah.
- [23] Munzir, Dfinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksasan Informasi Keuangan Daerah. *FAIR: Financial & Accounting Indonesian Research*, 2(1), 18–32.
- [24] Pemerintah Daerah Se-Luwu Raya) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- [25] Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- [26] Putra, A. A. A., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita dan Leverage Terhadap Keteraksasan Internet Financial
- [27] Rahayu, A., Andika, B., Masfirdaus, E., & Yuistira, M. I. (2023). Analisis Hubungan antara Indeks Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi di Wilayah Sumatra Utara. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- [28] Rahman, A., Sutaryo, & Budiatmanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Local

- Reporting Di Indonesia. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 4(2), 946.  
<https://doi.org/10.17509/jaset.v4i2.10095>
- [29] Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), 1049-1062
- [30] Report Oleh Pemerintah Daerah. 2(1), 2020–2034.
- [31] Rindiyan, & Mubaraq, A. (2023). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat
- [32] Pratiwi, A., & Rizky, M. C. (2024). Analisis Gaya Kepemimpinan, Employee Engagement dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Sarana Baja Perkasa Medan. MANEGGIO: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 7(2), 161-171.
- [33] Sari, M. A. P., & Maharani, H. (2024). Pengaruh Komunikasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Adikara Lestari Nusantara (Mr. Creampuff) Sawangan Depok. JORAPI: Journal of Research and Publication Innovation, 2(1), 577–588.
- [34] Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah.
- [35] Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility Of Financial Reporting Of U.S. Municipalities On The
- [36] Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [37] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development (11th ed.).
- [38] Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta: Erlang kesembilan, jilid I). Jakarta: Brigham, E. F., & Houston, J. F. 2006. Fundamental of Financial Management, Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Buku 2, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat. Erlangga.
- [39] Ulya, H. U., Yustiana, S., & Ismiyanti, Y. (2025). Implementasi Literasi Sosial di Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Pengembangan Karakter Siswa di Era Modern. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11(02), 482-489.
- [40] UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. United Nations Development Programme.
- [41] Wau, Ikhlas, and Dwi RATMONO. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2015.
- [42] Wulandari, A. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8(6), 1–20.
- [43] Yusuf, M., Lihawa, F., & Baderan, D. W. K. (2024). Kajian Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Gorontalo. Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan, 3(2), 262–273.